KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DAN BADAN USAHA MILIK DALAM MEMPERKUAT SINERGITAS KELEMBAGAAN DESA SADANANYA KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS

Ela Srinuryani¹, Lina Marlioni², R Didi Djadjuli³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail :

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi belum optimalnya komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Desa dengan Badan Usaha Milik Desa yang difungsikan sebagai penggerak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, yang ditandai lemahnya intensitas komunikasi baik formal dan non formal, rendahnya kepekaan dalam mengembangkan potensi, kejelasan pertanggungjawaban pengelola Bumdesa. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non-partisipan, wawancara terstruktur, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sudah berjalan tetapi belum optimal, dilihat dari 5 Indikator yang diukur 4 indikator sudah berjalan yaitu Sikap Respect, Empathy, Audible, Clarity dan Humble, meskipun pada beberapa indikator sudah terlaksana. Hambatan yang ditemukan adalah rendahnya intensitas pertemuan kelembagaan, keterlibatan dan pengetahuan masyarakat, kuantitas dan kualitas SDM dan pengembangan kerjasama. Upaya yang dilakukan pemerintah desadan BUMDesa berkoordinasi dan membuat nota kesepahaman, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM.

Kata Kunci : *Komunikasi, Pemerintahan Desa, BUMDesa. Sinergitas*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berorganisasi, proses komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pengembangan BUM Desa. Melalui komunikasi, akan terjadi pertukaran pesan, gagasan, ide-ide, pengalaman, maupun informasi tentang program-

program pemerintah, sehingga memungkinkan bagi BUMDesa untuk mengetahui apa saja yang menjadi maksud dan tujuan pemerintah desa dalam usaha membangun desa.

Komunikasi kelembagaan tingkat desa merupakan proses penyampaian ide, gagasan, dan program pemerintah kepada BUMDesa dalam rangka mencapai tujuan pendiriannya, yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam dan potensi yang ada dimiliki oleh desa.

Esensi penting dari komunikasi kelembagaan di sini adalah pemerintah desa diartikan sebagai komunikator dan BUM Desa sebagai komunikan. Namun, dalam suasana tertentu, bisa terjadi sebaliknya, di mana BUM Desa berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan oleh pemerintah desa. Dalam kondisi demikian, pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan untuk merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Maka, peran komunikasi pemerintah desa yang baik terhadap BUM Desa bisa menghasilkan dampak positif bagi kemajuan desa.

Seperti telah kita ketahui, proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan dari komunikator kepada komunikan. Pikiran itu dapat berupa gagasan, informasi, atau opini. Sementara perasaan dapat berupa ekspresi, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, maupun kepastian. Ukuran berhasil atau tidaknya komunikasi sangat tergantung pada sejauh mana korelasi penyampaian antara pikiran dan perasaan. Komunikasi menjadi efektif bila pesan yang diterima dapat dimengerti dan ditindaklanjuti dengan perbuatan komunikan sebagaimana dimaksudkan komunikator.

Saat terjadinya proses pertukaran informasi secara jelas, menggunakan

media yang tepat, dan terjadinya kesamaan persepsi antara kedua belah pihak maka dengan sendirinya tercapai makna komunikasi, hal ini senada dengan Wulandari (2009) yang mengatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah proses penyampaian pesan, gagasan, atau perasaan dengan cara-cara yang baik dan dalam kontak sosial yang baik pula. Komunikasi akan menjadi efektif bila pesan yang diterima dapat dimengerti dan ditindaklanjuti dengan perbuatan komunikan sebagaimana dimaksudkan komunikator. Komunikasi efektif akan terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima komunikan dengan baik dan terhindar dari *mis*-persepsi.

Menurut Sri dan Dewi (2014), BUM Desa merupakan badan hukum yang berfungsi sebagai entitas ekonomi yang terpisah dari Pemerintah Desa, dengan tugas untuk mengelola secara efektif berbagai sumber daya ekonomi desa. Sementara menurut Sinarwati (2021), BUM Desa adalah lembaga sosial yang dijalankan secara wirausaha, dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Dengan demikian, BUM Desa memiliki peran yang strategis dalam pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat desa, serta dalam menjalankan fungsi-fungsi perekonomian yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga ekonomi

yang didirikan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUM Desa didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi di pedesaan. Hal ini sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), di mana BUM Desa didirikan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, BUM Desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di tingkat desa, serta dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Dengan mendirikan BUM Desa "Mulia Sadananya", Desa Sadananya berkomitmen untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset yang ada, mengembangkan investasi dan

produktivitas, serta menyediakan berbagai jenis jasa pelayanan dan usaha lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sadananya sebesar-besarnya. BUM Desa seperti "Mulia Sadananya" diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengoptimalkan potensi ekonomi dan sumber daya yang tersedia di desa. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa BUM Desa dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi pedesaan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan.

Untuk mencapai pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui implementasi inovasi di BUM Desa, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan :

1. Membentuk Unit Usaha: BUM Desa dapat membentuk unit usaha baru atau mengembangkan unit usaha yang sudah ada dengan memanfaatkan potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia yang ada di desa. Misalnya, pengembangan usaha pertanian, usaha kerajinan lokal, atau jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa
2. Optimalisasi Aset Desa: Memanfaatkan berbagai aset desa seperti lahan pertanian, hutan, sumber air, atau potensi pariwisata untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan desa. Ini dapat dilakukan dengan

pendekatan pengelolaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. Fokus pada tiga sektor utama yaitu potensi ekonomi, potensi sosial dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan menggabungkan strategi ini, BUM Desa seperti "Mulia Sadananya" dapat menjadi pusat inovasi dan penggerak utama dalam mencapai kemandirian ekonomi dan sosial desa. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi desa dalam skala yang lebih luas.

Namun berdasarkan observasi yang dilakukan terlihat bahwa sinergitas antara Pemerintah Desa dengan Badan Usaha Milik Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis masih belum optimal yang ditunjukkan oleh gejala berikut:

- 1) Rendahnya komunikasi antara pihak BUMDesa dengan Pemerintah Desa sehingga tidak adanya program Desa yang mendorong pengembangan bersama dengan BUMDesa yang tertuang dalam program kerja Desa melalui APBDesa, tetapi hanya penyertaan modal saja.
- 2) Kurang jelasnya laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan BUMDesa kepada Pemerintah Desa selaku pemberi modal

Fenomena kelemahan membangun komunikasi kelembagaan diatas dipandang dari perpektif

sinergitas kelembagaan menggambarkan peranan penting komunikasi orgaaniasasi antara BUMDesa dan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk mengatur dan mendukung inisiatif yang dapat memajukan desa secara sosial dan ekonomi dan BUM Desa berperan sebagai entitas yang bergerak sesuai tujuan utamanya diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai usaha ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara untuk memahami konsep komunikasi kelembagaan ditingkat desa ini, menggunakan teori sinergitas yang dikembangkan oleh Doctorrof (Rohmah, 2022 : 13) meliputi dimensi Komunikasi yang efektif dengan indikator Sikap *Respect*, *Empathy*, *Audible*, *Clarity* dan *Humble*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya sikap saling menghargai dan menghormati antara pengurus BUMDesa dan Pemerintah Desa
- b. Adanya sikap saling membutuhkan antara BUMDesa dan Pemerintah Desa
- c. Adanya sikap saling terbuka dan kepedulian dalam mendengarkan keluhan antara BUMDesa dan Pemerintah Desa
- d. Adanya kejelasan dalam penyampaian informasi tentang laporan pertanggungjawaban dari BUMDesa dan Pemerintah Desa

- e. Adanya sikap saling rendah hati dalam komunikasi antara BUMDesa dan Pemerintah Desa

Komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu komunikasi yang berorientasi pada sumber dan komunikasi yang berorientasi pada penerima. Komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan di mana seseorang secara sungguh-sungguh memindahkan informasi atau pesan kepada pihak lain. Komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa komunikasi adalah semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan. Fokus utamanya adalah pada pihak yang menerima pesan (komunikasikan). Komunikasi efektif dalam konteks ini adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap (attitude change) pada orang lain yang dapat terlihat dalam proses komunikasi. Tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Hal ini berarti bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi harus lebih jelas dan lengkap, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi. Dengan demikian, komunikasi yang berorientasi pada penerima bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan respons positif dari komunikasikan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan dan bersifat deskriptif, seperti pola komunikasi antara pemerintah desa dengan pengelola BUMDesa, pengertian konsep komunikasi, sinergitas, dan potensi desa yang beragam. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber utama yaitu Sumber data primer adalah Data yang diperoleh langsung dari lapangan, contohnya melalui wawancara dengan responden yang terlibat langsung dalam aktivitas BUMDesa atau melalui observasi langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh BUMDesa Sumber data sekunder adalah Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan BUMDesa, serta buku-buku literatur yang relevan. Sumber data sekunder ini dapat berupa dokumen seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Desa, serta literatur akademis atau laporan penelitian terkait dengan BUMDesa. Dengan memanfaatkan kedua jenis sumber data ini, penelitian dapat menggali informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai BUMDesa, baik dari sudut pandang praktis lapangan maupun dari perspektif teoritis yang terdokumentasikan.

Pengumpulan data diperoleh melalui aktivitas observasi langsung di objek penelitian yaitu wawancara terstruktur kepada 7 orang informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari pihak Pemerintah Desa, Pengurus BUMDES Sadananya Mulia Sadananya. Teknik analisis data dalam penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang penting untuk memahami dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut:

Pengumpulan data: Kegiatan untuk mengumpulkan data baik itu dari sumber data primer (misalnya wawancara atau observasi langsung) maupun dari sumber data sekunder (dokumen-dokumen dan literatur).

Reduksi data: Proses untuk menyusun, mengorganisir, dan menyaring data yang relevan dari berbagai sumber. Ini melibatkan pemilihan dan fokus pada data yang paling signifikan untuk analisis lebih lanjut.

Penyajian data: Langkah untuk mengorganisir dan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau narasi yang sistematis. Penyajian data ini memungkinkan peneliti dan pembaca untuk melihat pola atau tren yang muncul dari data.

Penarikan kesimpulan: Proses untuk menafsirkan hasil analisis data dan mengambil kesimpulan yang relevan dan berdasarkan bukti dari data tersebut. Kesimpulan ini harus didukung oleh temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data yang telah dilakukan. Setiap tahapan dalam teknik analisis data ini penting untuk memastikan

bahwa hasil penelitian tidak hanya informatif tetapi juga dapat dipercaya dan relevan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, penulis akan menjelaskan Komikasi antara Pemrintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

Hasil penelitian terkait dengan komunikasi kelembagaan dalam mendukung sinergitas Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya dapat dijelaskan seperti dibawah ini.

1. Sikap *Respect*

Respect dalam konteks komunikasi memang diartikan sebagai bentuk sikap saling menghargai dan menghormati antara komunikator dan komunikan. Ini berarti bahwa keinginan, pandangan, atau perasaan yang disampaikan oleh pihak yang terlibat dalam komunikasi harus dihargai dan dihormati secara tulus. Dalam konteks ini, keinginan yang diutarakan atau ekspresi yang dibagikan merupakan sesuatu yang penting dan tidak boleh diabaikan, melainkan perlu dipertimbangkan dengan serius. Dengan menjaga sikap *respect* dalam komunikasi, hubungan antara komunikator dan komunikan dapat dibangun dengan lebih baik, sehingga memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan penghargaan atas martabat dan hak setiap individu untuk dihormati dalam interaksi komunikasi mereka.

Dalam konteks organisasi, sikap saling menghormati dan menghargai antara Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mulia Sadananya sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja sama yang optimal dan harmonis. Ketika Pemerintah Desa berkomunikasi dengan sikap respek yang tinggi, hal ini mencerminkan penghargaan dan kesediaan untuk mendengarkan serta mempertimbangkan pandangan dan kebutuhan BUMDesa. Dengan menciptakan kerja sama yang sinergis antara Pemerintah Desa dan BUMDesa, komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, sikap respek yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa juga dapat meningkatkan kinerja BUMDesa itu sendiri dengan mendorong partisipasi aktif, motivasi, dan kreativitas dalam menjalankan berbagai inisiatif ekonomi dan sosial di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Komunikasi antara Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya dalam indikator sikap *respect* sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap menghargai, antara Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya Sebagaimana dengan yang disampaikan oleh Palifiana, dkk (2020: 11) yaitu;

Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum pertama dalam berkomunikasi. Ingatlah,

pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika harus mengkritik atau memarahi seseorang lakukan dengan penuh respect terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat menciptakan kerjasama yang menghasilkan sinergi. Hal ini akan secara signifikan meningkatkan efektivitas komunikasi antara Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya, baik dari perspektif individu maupun sebagai tim secara keseluruhan. Sikap saling menghargai dan menghormati menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, di mana setiap pihak merasa dihargai atas kontribusinya dan dihormati atas perspektifnya. Dengan demikian, proses komunikasi tidak hanya menjadi lebih terbuka dan jujur, tetapi juga lebih produktif karena tercipta kepercayaan dan kerjasama yang kuat. Ketika Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya mampu berkomunikasi dengan sikap *respect* ini, mereka dapat lebih mudah menangani perbedaan pendapat atau tantangan yang muncul, serta merancang solusi yang lebih baik dan lebih tepat guna untuk kemajuan desa. Selain itu, sikap ini juga membangun fondasi yang solid untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan pelayanan yang lebih baik.

2. *Empathy.*

Empati adalah sikap di mana seseorang mampu merasakan dan memahami perasaan atau kondisi orang lain secara dalam. Dalam konteks praktik komunikasi, memiliki sikap empati terhadap kondisi BUMDesa sangatlah penting. Ini berarti Pemerintah Desa perlu memiliki kemauan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan sikap peduli terhadap kebutuhan dan perspektif BUMDesa. Dengan adanya sikap empati ini, Pemerintah Desa dapat lebih baik dalam menyampaikan pesan dengan cara yang lebih tepat dan relevan. Mereka akan mampu berkomunikasi dengan cara yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan yang dirasakan oleh BUMDesa. Hal ini tidak hanya membuat pesan lebih mudah diterima oleh BUMDesa, tetapi juga memperkuat hubungan dan kolaborasi antara kedua belah pihak. Dengan demikian, sikap empati bukan hanya merupakan persyaratan penting dalam praktik komunikasi yang efektif, tetapi juga merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja sama yang positif dan produktif antara Pemerintah Desa dan BUMDesa dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Komunikasi antara Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya pada indikator *empathy* sudah berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari terciptanya komunikasi yang harmonis didukung sikap saling membutuhkan antara

Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya. Kondisi tersebut senada dengan pemikiran Palifiana, dkk (2020: 12) menyatakan bahwa:

Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain.

Dengan demikian, sikap saling membutuhkan antara Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya merupakan fondasi yang mendasar untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. BUMDesa memiliki hak untuk mendapatkan penyertaan modal atau dukungan finansial dari Pemerintah Desa, yang merupakan salah satu bentuk dukungan untuk mengembangkan usaha dan inisiatif ekonomi di desa. Dengan demikian, sikap saling membutuhkan antara Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya merupakan fondasi yang mendasar untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. BUMDesa memiliki hak untuk mendapatkan penyertaan modal atau dukungan finansial dari Pemerintah Desa, yang merupakan salah satu bentuk dukungan untuk mengembangkan usaha dan inisiatif ekonomi di desa. Dengan demikian, prinsip saling membutuhkan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerjasama yang

seimbang antara Pemerintah Desa dan BUMDesa dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan bersama di tingkat desa.

3. *Audible*

Sikap terbuka (*audible*) dan kepedulian dalam komunikasi antara Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya mengacu pada pentingnya transparansi, keterbukaan, dan perhatian dalam setiap interaksi mereka. Ini berarti bahwa dalam hubungan yang baik antara kedua belah pihak, komunikasi harus dilakukan dengan cara yang memfasilitasi pemahaman yang baik dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dengan sikap terbuka, Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya akan lebih mudah untuk saling berbagi informasi, gagasan, dan kebutuhan mereka secara jujur dan transparan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana setiap pihak merasa didengar dan dipedulikan, sehingga memungkinkan komunikasi berjalan lancar tanpa hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang baik antara Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya dengan menjunjung tinggi sikap terbuka dan kepedulian dalam komunikasi adalah kunci untuk memastikan bahwa komunikasi berjalan lancar dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada indikator adanya sikap keterbukaan dan kepedulian antara Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya sudah berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena

adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya sehingga akan terjalin komunikasi yang baik. keterbukaan dan kepedulian antara pemberi pesan dan penerima pesan akan mempengaruhi informasi yang disampaikan. Sebagaimana yang telah disampaikan Palifiana, dkk (2020: 239).

Komunikasikan harus menyadari bahwa pesan (*message*) yang disampaikan harus benar-benar dimengerti oleh orang lain. Adanya kemampuan *audible* mendorong komunikasikan memiliki sikap terbuka dan kepedulian dalam mendengarkan keluhan atau informasi dari pemberi atau penerima informasi.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sikap saling terbuka dan kepedulian antara Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya keberhasilan dalam sebuah organisasi. Sikap keterbukaan dan kepedulian ditandai dengan sikap yang jujur atau tidak berkata bohong tidak menyembunyikan informasinya yang sebenarnya terjadi.

4. *Clarity*

clarity atau keterbukaan dan transparansi sangat penting dalam komunikasi. Ketika kita berkomunikasi dengan sikap yang jelas dan terbuka, kita memastikan bahwa tidak ada informasi yang disembunyikan atau ditutupi dari penerima pesan atau anggota tim kita. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk membangun rasa percaya (*trust*). Rasa percaya adalah unsur kunci dalam hubungan kerja sama dan kolaborasi yang efektif. Tanpa

keterbukaan, mungkin akan timbul sikap saling curiga di antara anggota tim atau kelompok. Ini dapat mengurangi semangat dan antusiasme untuk bekerja sama, karena masing-masing individu tidak merasa bahwa mereka mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur. Oleh karena itu, dalam upaya membangun hubungan yang solid dan produktif, penting untuk memastikan bahwa komunikasi dilakukan dengan jelas dan terbuka. Hal ini tidak hanya membantu dalam memperkuat kerjasama dan pencapaian tujuan bersama, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan indikator adanya kejelasan informasi dalam laporan pertanggungjawaban dari BUMDesa Mualia Sadananya dan Pemerintah Desa belum berjalan baik. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa hambatan informasi yang disampaikan dari pengelola BUMDesa kepada Pemerintah Desa belum jelas dan belum dipahami baik bagi pemberi informasi maupun penerima informasi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Palifiana, dkk (2020: 240), menyatakan bahwa :

Kejelasan (*clarity*) berarti adanya suatu kejelasan terhadap isi pesan komunikasi, sehingga isi pesan tersebut tidak menimbulkan multi-interpretasi, multipresepsi, dan multitafsir.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa adanya kejelasan dalam penyampaian informasi terkait Laporan Pertanggungjawaban dari

BUMDesa kepada Pemerintah Desa sangat penting untuk memastikan bahwa proses transparansi dan keterbukaan terjaga dengan baik. Transparansi keuangan mengacu pada praktik menyampaikan informasi keuangan secara jelas, terbuka, dan dapat dipahami kepada masyarakat luas, termasuk warga desa. Dengan adanya transparansi keuangan, beberapa hal penting dapat tercapai: **Pertanggungjawaban Pemerintah:** Informasi keuangan yang transparan memungkinkan Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan sumber daya desa secara tepat dan efisien kepada masyarakat. **Kepatuhan terhadap Ketentuan:** Penyampaian informasi keuangan yang transparan juga mencerminkan ketaatan Pemerintah Desa terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. **eningkatan Pengawasan Masyarakat:** Dengan transparansi keuangan yang baik, masyarakat memiliki akses yang lebih baik untuk mengawasi dan memahami bagaimana dana publik digunakan dan hasil yang dicapai dalam pembangunan dan pelayanan di desa mereka.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa praktik transparansi keuangan tidak hanya penting untuk membangun kepercayaan antara Pemerintah Desa, BUMDesa, dan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa informasi keuangan disampaikan dengan jelas dan

terbuka, kita dapat mengurangi risiko kesalahan dan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

5. *Humble*

Sikap rendah hati (*humble*) adalah sikap yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan produktif dengan orang lain. Sikap ini mencerminkan kemampuan untuk menghargai orang lain, melayani dengan tulus, mau mendengar dan menerima kritik dengan terbuka, serta tidak sombong atau merendahkan orang lain. Pada intinya sikap rendah hati meliputi antara lain sikap yang penuh melayani, sikap menghargai, mau mendengar dan menerima kritik, tidak sombong dan memandang rendah orang lain, berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut dan penuh pengendalian diri, serta mengutamakan kepentingan yang lebih besar.

Sikap rendah hati membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, baik dalam konteks Pemerintah Desa, BUMDesa, maupun dalam hubungan komunitas yang lebih luas. Ini juga mempromosikan kerjasama yang efektif dan respektif terhadap perbedaan pendapat atau pandangan, sehingga memperkuat komunikasi dan kolaborasi yang positif dalam mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi indikator adanya sikap saling rendah hati dalam komunikasi antara Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya sudah berjalan namun belum optimal. Fenomena ini merefleksikan

masih adanya kesenjangan peran dan fungsi masing-masing pihak termasuk ego sektoral yang masih menjadi bagian pola komunikasi. Kesetaraan yang berpijak pada karakter lokal masyarakat pedesaan dalam berinteraksi baik secara personal maupun kelembagaan dapat membangkitkan semangat saling menghargai yang tercermin dalam perilaku *humble*, sebagaimana konsep yang disampaikan oleh Palifiana, dkk (2020: 240) yaitu:

Sikap rendah hati sangat dibutuhkan dalam menciptakan atau membangun sikap saling menghargai dan menghormati.

Dengan demikian dapat dijelaskan pola komunikasi yang berjalan antara Pemerintah Desa dan BUMDesa Mulia Sadananya berjalan baik dilihat dalam aktivitas pertukaran informasi terkait dengan perkembangan BUMDesa seperti kesediaan menerima masukan, gagasan dan saran dalam pembangunan UMKM di Desa Sadananya. Keharmonisan komunikasi yang dikembangkan kedua pihak dalam menjalani peran secara proporsional ini memberikan dampak signifikan pada pengelolaan usaha dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan desa Sadananya seiring tumbuhnya kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai Komunikasi pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam memperkuat sinergitas kelembagaan desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis sudah berjalan tetapi belum

optimal, Hal tersebut dapat dilihat dari 5 indikator yang diukur yaitu adanya sikap respect, Empathy, Audible Clarity dan humble sudah berjalan namun belum optimal terutama pada indikator keterbukaan laporan pertanggungjawaban dari pihak pengelola BUMDesa Mulia Sadananya.

Adapun hambatan yang ditemui yakni, kurang kejelasan dalam penyampaian informasi tentang laporan pertanggungjawaban dari BUMDesa kepada Pemerintah Desa. rendahnya intensitas pertemuan kelembagaan, keterlibatan dan pengetahuan masyarakat, kuantitas dan kualitas SDM dan pengembangan kerjasama. Upaya yang dilakukan BUMDesa dan pemerintah desa berkoordinasi dan membuat nota kesepahaman, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM,

DAFTAR PUSTAKA

Amelia Sri Kusuma Dewi 2014, peranan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (pades) serta menumbuhkan perekonomian desa, *Journal Of rural and Development / Volume V No. I februari 2014*

Palifiana, Desyka Arthyka, dkk, 2020, *Buku ajar komunikasi efektif dan konseling*, Yogyakarta, Resspati Press

Rohmah, Iis Silvia, dan Asep Haryanto. 2022. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan BUMDes sebagai Peran Mewujudkan Kemandirian: Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Satori Djam'an dan Komariah Aan, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung,. Alfabeta.

Sinarwati, N. K.2021. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelora Desa Membangun*. Indonesia, Yogyakarta: Expert.

Tama, Diantika Ovi Era dan Yanuardi. 2013. Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Naskah Publikasi. Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.